

**Kualitas audit aparat inspektorat dalam
pengawasan keuangan daerah provinsi
kalimantan timur dengan etika auditor**

Oleh:

ERMI UTAMI
1401016011

Prof. Dr. Theresia Militina, SE., Msi (Pembimbing I)
Dr. Hj. Anis Rachma Utary, Msi.,Ak., CA (Pembimbing II)



JURNAL

**PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2018**

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, kompetensi, independensi, motivasi, terhadap kualitas audit aparat inspektorat dengan pengawasan keuangan lokal oleh etika auditor sebagai variabel moderasi. Kasus umum dari penelitian ini adalah ada penemuan tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor intern, tetapi ditemukan auditor eksternal, BPK. Penelitian ini menggunakan data primer, populasi penelitian ini adalah seluruh inspektorat aparatur Provinsi Kalimantan Timur yang diikuti 44 orang, semua anggota populasi menjadi anggota sampel (census). Pengujian hipotesis dilakukan dengan model analisis regresi moderasi. Hasil penelitian menunjukkan dengan akuntabilitas parsial memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas audit, kompetensi memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas audit, independensi memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas audit, motivasi memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas audit. Efek etika auditor tidak moderat akuntabilitas untuk mengaudit kualitas. Etika audit memperlemah hubungan antara kompetensi dan kualitas audit. Etika audit memperlemah hubungan antara Kemandirian dan kualitas audit. Etika audit memperlemah hubungan antara Motivasi dan kualitas audit.

Kata kunci: kualitas audit; akuntabilitas; kompetensi; kemerdekaan; motivasi; etika audit

A B S T R A C

Audit quality of Apparatus Inspektorat of Province East Kalimantan with local financial supervision by Auditor's Ethics as moderation variables.

The purpose of this research is to know the effect of accountability, competence, independence, motivation, to the audit quality of apparatus inspektorat with local financial supervision by auditor's ethics as moderation variables. The common case of this research is there were undetectable invention by apparatus inspektorat as intern auditor, but found be external auditor, BPK. This research using primary data, population of this research is all apparatus inspektorat of Province East Kalimantan who 44 people participated, all members of population to be members of sample (census). Hypothesis testing perform is done with moderation regression analyst model. Research result showed with accountability partial gave a significant positive effect to audit quality, competence gave a significant positive effect to audit quality, independence gave a significant positive effect to audit quality, motivation gave a significant positive effect to audit quality. Auditor ethic effect doesn't moderate accountability to audit quality. Audit ethic weaken relationship between competence and audit quality. Audit ethic weaken relationship between Independence and audit quality. Audit ethic weaken relationship between Motivation and audit quality.

Keywords: audit quality; accountability; competence; independence; motivation; audit ethic

PENDAHULUAN

Latar belakang

Penyalahgunaan wewenang para penyelenggara negara, baik korupsi, kolusi maupun nepotisme makin banyak menuai kritik. Berbagai pendapat bahwa keberadaan sektor publik tidak efisien dan jauh tertinggal dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi di sektor swasta. Lembaga sektor publik masih mempunyai kesempatan yang luas untuk memperbaiki kinerja dan memanfaatkan sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif. Istilah “Akuntabilitas publik, *value for money*, reformasi sektor publik, privatisasi, *good publik government*” telah begitu cepat masuk kedalam kamus sektor publik (Mardiasmo, 2004:17).

Konsep *Good Governance* jika dikembangkan akan menciptakan *modern governance* (baik *good ‘national’ governance* maupun *good local governance*) yang handal yang tidak hanya menekankan aktifitasnya dalam kerangka efisiensi tetapi juga akuntabilitasnya di mata publik. Hal

yang tidak kalah pentingnya, penerapan *good governance* sangat berperan dalam pencegahan dan pemberantasan praktik-praktik KKN. Hal ini berarti bahwa dengan adanya *good governance* maka penyalahgunaan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi dapat dihindarkan semaksimal mungkin (Anis Rachma Utary, 2014:73)

Sedangkan *good governance* menurut *World Bank* didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frameworks* bagi tumbuhnya aktifitas kewirausahaan (Anis Rachma Utary, 2014:71).

Salah satu unit yang melakukan audit/ pemeriksaan terhadap

pemerintah daerah adalah Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya Inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2005). Fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan satu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas

pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Akuntabilitas secara langsung berpengaruh terhadap kualitas audit Aparat Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur?
2. Apakah motivasi secara langsung berpengaruh terhadap kualitas audit Aparat Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur?
3. Apakah Etika auditor pemoderasi motivasi terhadap kualitas audit?

Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis dan mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit Aparat Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
2. Menganalisis dan mengetahui pengaruh motivasi terhadap

kualitas audit Aparat Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

3. Menganalisis dan mengetahui pengaruh interaksi motivasi dan etika auditor terhadap kualitas audit Aparat Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah umumnya dan Inspektorat Provinsi Kaltim khususnya dapat di jadikan bahan masukan untuk lebih meningkatkan kualitas audit dalam pengawasan keuangan daerah, sehingga tercipta transparansi untuk semua pengguna laporan keuangan.
2. Melengkapi penelitian serupa yang telah dilakukan penelitian terdahulu serta sebagai bahan perbandingan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu.
3. Menambah referensi di perpustakaan pasca sarjana ilmu ekonomi khususnya Ekonomika keuangan daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh LilisArdini (2010) mengenai pengaruh kompetensi, independensi, akuntabilitas dan motivasi terhadap kualitas audit. Peneliti menyimpulkan bahwa Variabel kompetensi, independensi, akuntabilitas dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit adalah signifikan. Dari hasil uji T diketahui bahwa masing-masing variabel kompetensi, independensi dan akuntabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Nordiawan (2006) dalam ketentuan umum pada peraturan pemerintah Republik Indonesia 58 tahun 2005 menyebutkan bahwa :

“ pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, dan pertanggungjawaban keuangan daerah “

Penelitian terdahulu yang terdapat didalam penelitian ini menunjang dasar penulis melakukan penelitian.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib

menyampaikan pertanggung jawaban berupa :

1. Laporan realisasi anggaran
2. Neraca
3. Laporan arus kas
4. Catatan atas laporan keuangan

Pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi tiga proses besar. Tiga proses tersebut adalah perencanaan (termasuk didalamnya aktifitas penetapan APBD/ penganggaran), penatausahaan (proses pelaksanaan APBD) dan pelaporan (pertanggungjawaban APBD). Proses akuntansi merupakan bagian dari aktifitas pelaporan yang mengharuskan setiap pengguna anggaran/pengguna barang untuk melaporkan seluruh transaksi ke dalam laporan keuangan. Struktur APBD terdiri dari penerimaan daerah yang dirinci berdasarkan urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan. Sampai sejauh ini, di Indonesia belum di atur mengenai standar akuntansi keuangan pemerintah yang merupakan acuan untuk menyusun dan membuat pelaporan keuangan pemerintah. Meskipun di tahun 2002 dan tahun 2003 telah dilakukan sejumlah dengar pendapat publik atas 11 rancangan publikasian mengenai standar akuntansi keuangan pemerintah.

Namun sampai sekarang belum ada pengesahannya sehingga berdampak pada penyusunan pelaporan keuangan dan juga audit atas pelaporan keuangan pemerintah daerah (Afiah, 2009).

Sejalan dengan era reformasi, akuntansi sektor publik mulai mendapat perhatian yang serius. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Dalam pemerintahan sendiri sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktek manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Organisasi sektor publik termasuk pemerintah saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola

urusan-urusan publik. Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansial keberadaannya (Mardiasmo, 2002 : 324).

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Gambaran umum Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah

Provinsi Kalimantan Timur. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur adalah unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok yaitu ” *Melaksanakan Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pengawasan Urusan Pemerintahan Provinsi.* ” Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan ;
4. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan ;
5. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

Ruang lingkup kegiatan pengawasan pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi : Administrasi Umum Pemerintahan yang terdiri dari : Kebijakan Daerah, Kelembagaan, Pegawai Daerah, Keuangan Daerah dan Barang Daerah. Pengawasan Urusan Pemerintahan yang terdiri : Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Pengawasan Lainnya yang terdiri : Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pemeriksaan Akhir Jabatan Masa Jabatan Bupati/Walikota, pemeriksaan khusus dan review atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah dan SKPD serta Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Evaluasi

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Bab ini membahas analisis data dan hasil penelitian tentang Kualitas Audit Aparat Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam pengawasan keuangan daerah dengan Etika Auditor sebagai variabel moderasi.

Data primer diolah dengan menggunakan SPSS. Jawaban dari setiap pernyataan responden di tabulasi kedalam SPSS untuk

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.

mengetahui deskripsi variabel penelitian.

Hasil tabulasi kuisioner variabel Kualitas Audit (Y)

Variabel Kualitas Audit di bagi menjadi 2 indikator yang terdiri dari 11 pernyataan, hasil tabulasi setiap jawaban responden dapat di lihat pada tabel-tabel dibawah ini :

1. Saat menerima penugasan, auditor menetapkan sasaran, ruang lingkup dan metodologi audit.

Tabel 5.1 Hasil tabulasi kuisioner pernyataan nomer 1

keterangan	skala	responden	score	percent
SS	5	19	95	45,23%
S	4	21	84	50,00%
CS	3	2	6	4,76%
TS	2	0	0	0,00%
STS	1	0	0	0,00%
Total		42	185	100%

Sumber : Auditor Aparat Inspektorat Pemprov Kaltim

Menurut data yang sudah dikonversi dengan skala likert, dapat di jelaskan bahwa dari 42 responden, 19 responden menjawab sangat setuju, 21 responden menjawab setuju dan 2 responden menjawab cukup setuju. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban paling banyak Aparat inspektorat adalah

setuju untuk menetapkan sasaran, ruang lingkup dan metodologi Audit pada saat penugasan dengan score 84 dan persentase 50,00%.

2. Dalam semua pekerjaan saya direview oleh atasan secara berjenjang sebelum laporan hasil audit dibuat.

Tabel 5.2 Hasil tabulasi kuisioner pernyataan nomer 2

keterangan	skala	Responden	Score	Percent
SS	5	19	95	45,23%
S	4	20	80	47,61%
CS	3	3	9	7,14%
TS	2	0	0	0,00%
STS	1	0	0	0,00%
Total		42	184	100%

Sumber : Auditor Aparat Inspektorat Pemprov Kaltim

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Ada tidaknya korelasi

antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* $> 0,1$ dan $VIF < 10$, maka dinyatakan tidak ada korelasi sempurna antar variabel independen dan sebaliknya (Ghozali, 2006). Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat tabel berikut:

▪

▪

▪

▪

▪

Tabel 5.60
Hasil uji mulikolinearitas

		Coefficients ^a							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	-,477	,591		-,808	,424			
	x1	,675	,175	,595	3,861	,000	,262	3,817	
	x2	-,413	,206	-,344	-2,004	,053	,211	4,730	
	x3	,272	,119	,285	2,290	,028	,402	2,486	
	x4	,038	,054	,058	,702	,487	,901	1,110	
	x5	,604	,254	,393	2,380	,023	,228	4,384	

▪

a. Dependent Variable: y

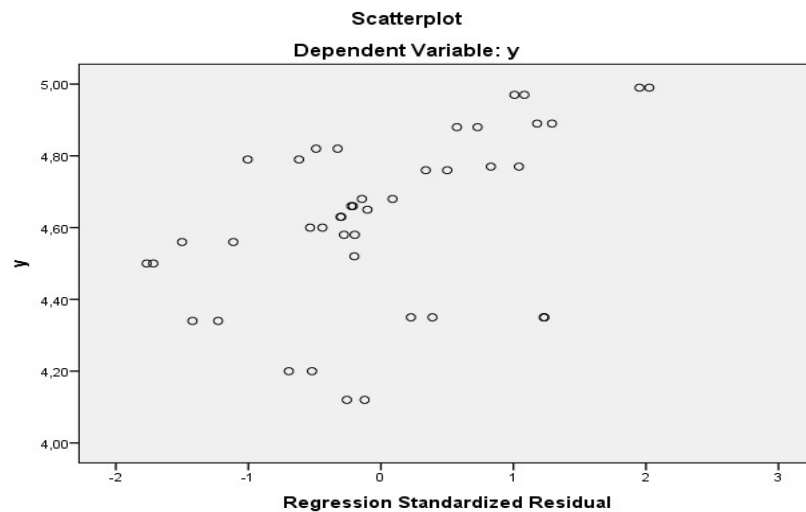
Sumber : Data primer diolah, 2009

Berdasarkan Tabel 5.60 di atas dapat dilihat bahwa angka *tolerance* dari variabel independen kompetensi dan independensi mempunyai nilai *tolerance* lebih dari 0,10 yang berarti bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Sementara itu, hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama. Tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen tersebut.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui kesamaan varian masing-masing variabel independen x_1 , x_2 , x_3 , x_4 dan x_5 terhadap variabel terikat (Y). Pengujian homogenitas terhadap variabel penelitian digunakan uji heteroskedastisitas. Deteksi terhadap masalah heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik sebaran nilai residual. Uji heteroskedastisitas menggunakan metode grafik *plotRegression Standarized Predicted Value* dengan *Regression Studentized Residual*. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar 5.3 berikut ini :

GAMBAR 5.3
GRAFIK SCATTERPLOT



Sumber : Data primer diolah, 2009

Berdasarkan grafik scatterplot di atas tampak bahwa sebaran data tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah

angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Analisis dan Pengujian Hipotesis

Analisis regresi moderasi

Pada bagian ini akan diuji Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kalimantan Timur dengan menggunakan metode statistik *Moderated Regression Analysis* (MRA). Model persamaan analisis regresi moderasi dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut (Ghozali, 2009) :

1. $Y = a + b_1x_1 + b_2x_5 + b_3x_1x_5 + e$
2. $Y = a + b_1x_2 + b_2x_5 + b_3x_2x_5 + e$
3. $Y = a + b_1x_3 + b_2x_5 + b_3x_3x_5 + e$
4. $Y = a + b_1x_4 + b_2x_5 + b_3x_4x_5 + e$

Dimana :

Y = Kualitas Audit

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

x_1 = Variabel Akuntabilitas Auditor

x_2 = Variabel Kompetensi Auditor

x_3 = Variabel Independensi Auditor

x_4 = Motivasi Auditor

x_5 = Etika Auditor

x_1x_5 = Interaksi antara variabel akuntabilitas auditor dan variabel etika auditor

x_2x_5 = Interaksi antara variabel kompetensi auditor dan variabel etika auditor

x_3x_5 = Interaksi antara variabel independensi auditor dan etika auditor

x_4x_5 = Interaksi antara variabel motivasi auditor dan variabel etika auditor

e = eror

Persamaan Analisis dan pengujian hipotesis Regresi Moderasi akuntabilitas auditor (x_1), etika auditor (x_5) , dan kualitas audit (Y)

Untuk mengetahui apakah variabel etika auditor merupakan variabel yang memoderasi pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit dilakukan perhitungan analisis menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh koefisien regresi dan nilai konstanta seperti pada tabel berikut :

Tabel 5.61 Hasil Koefisien Regresi regresi moderasi Akuntabilitas, Etika Auditor dan Kualitas Audit Aparat Inspektorat Pemprov Kaltim

Model	Unstandardized Coefficients		Coefficients ^a	t	Sig.	
	B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta			
(Constant)	-20,911	10,604		-1,972	,056	
x1	5,180	2,405	4,887	2,154	,038	
x5	5,548	2,515	4,100	2,205	,034	
x1x5	-1,115	,567	-7,761	-1,965	,057	

a. Dependent Variable: y

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 20, 2018

Persamaan regresi yang menjelaskan pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Kudit yang di moderasi oleh Etika Auditor adalah:

$$Y = -20,911 + 5,180 X_1 + 5,548X_5 - 1,115 X_1.X_5$$

Koefisien regresi atau beta dari variabel Akuntabilitas Auditor (x_1) sebesar 5,180 menunjukkan arah hubungan berbanding lurus (sejalan). Jadi pada saat ada kenaikan skor variable akuntabilitas maka skor kualitas audit akan meningkat sebesar 5,180 dengan anggapan faktor yang lain konstan (tidak berubah). Jadi semakin tinggi akuntabilitas Auditor maka kualitas audit aparat inspektorat akan semakin tinggi (baik).

akuntabilitas auditor (x_1), Etika auditor terdapat pengaruh yang tidak signifikan terhadap kualitas audit. Hal

Nilai signifikansi x_5 sebesar 0,34 lebih kecil dari α 0,05 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel Etika Auditor terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat.

nilai signifikansi x_1x_5 sebesar 0,057 lebih besar dari α 0,05 menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel interaksi x_1 dan x_5 terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat yang berarti **H5 ditolak**.

Etika auditor (x_5) sebagai variabel independen, menunjukkan terdapat hubungan yang positif signifikan terhadap kualitas audit. Pada saat interaksi dengan ini menunjukkan Etika Auditor berperan sebagai variabel independen saja. Jadi Etika Auditor memperlemah akan tetapi tidak signifikan hubungan antara

Akuntabilitas dengan Kualitas Audit.

Persamaan Analisis Regresi Moderasi Kompetensi Auditor (x_2), Etika Auditor (x_5), dan Kualitas Audit (Y)

Untuk mengetahui apakah variabel Etika Auditor merupakan variabel yang memoderasi pengaruh

Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit dilakukan perhitungan analisis menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh koefisien regresi dan nilai konstanta seperti pada tabel berikut :